

Tinjauan Mata Kuliah

Hukum Tata Negara Indonesia adalah mata kuliah yang mempelajari hukum tata negara positif Indonesia. Karena mata kuliah ini ada pada strata magister maka pokok bahasannya lebih mendalam. Pada mata kuliah ini mahasiswa mengkaji tentang konsepsi negara hukum Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, pelebagaan kekuasaan legislatif, pelebagaan kekuasaan eksekutif, pelebagaan kekuasaan yudisial, eksistensi lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*), perihal keuangan negara, peran konstitusional partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, warga negara dan kewarganegaraan, hak konstitusional warga negara, serta konsep-konsep dan isu-isu ketatanegaraan kontemporer.

- Modul 1 : Konsepsi Negara Hukum Indonesia
Pada Modul I mahasiswa akan diajak mempelajari pokok bahasan konsepsi negara hukum Indonesia. Sub pokok bahasan materi ini meliputi konsep negara hukum secara umum; konsep *rechstaat*; konsep *the rule of law*; dan negara hukum Indonesia.
- Modul 2 : Sistem Pemerintahan Indonesia
Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah sistem pemerintahan Indonesia dengan sub pokok bahasan, yaitu teori sistem pemerintahan; dinamika sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945; dan sistem pemerintahan Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945.
- Modul 3 : Pelebagaan Kekuasaan Legislatif
Modul III pokok bahasannya adalah Pelebagaan Kekuasaan Legislatif dengan Sub pokok bahasan meliputi Konsepsi dasar kekuasaan legislatif; Kelebagaan MPR; Kelebagaan DPR; Kelebagaan DPD; serta Kelebagaan DPRD.
- Modul 4 : Pelebagaan Kekuasaan Eksekutif
Pada Modul IV pokok bahasan dalam modul ini yaitu Pelebagaan Kekuasaan Eksekutif. Sub pokok bahasan dari modul yaitu Lingkup wewenang Presiden; Pembentukan kabinet pemerintahan; Hak prerogatif Presiden; Pemberhentian Presiden.
- Modul 5 : Kekuasaan Yudisial
Modul V membahas mengenai Pelebagaan Kekuasaan Yudisial. Sub pokok bahasan dalam Modul V ini meliputi Indepedensi kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; dan Mahkamah Konstitusi.

- Modul 6 : Keuangan Negara
Modul VI membahas mengenai Keuangan Negara yang terdiri dari pokok bahasan Konsepsi dasar Keuangan Negara; Prihal APBN; Kedudukan dan Kewenangan BPK; Prihal Bank Indonesia.
- Modul 7 : Eksistensi Lembaga Negara Pendukung (*State Auxiliary Organ*)
Modul VII pokok bahasannya yaitu *State Auxiliary Organ*. Sub pokok bahasan di Modul VII, yaitu Konsepsi *State Auxiliary Organ*; Jenis-jenis Lembaga negara pendukung; Kedudukan dan fungsi Lembaga negara pendukung Pengisian jabatan.
- Modul 8 : Partai Politik Indonesia
Modul VIII membahas tentang Partai Politik Indonesia. Pada modul VIII ini dibahas sub pokok bahasan tentang Konsepsi Dasar Partai Politik; Dinamika Pengaturan Partai Politik Indonesia; Peran Konstitusional Partai politik Indonesia.
- Modul 9 : Pemilihan Umum Indonesia
Modul IX memiliki pokok bahasan mengenai Pemilihan Umum Indonesia dengan sub pokok bahasan meliputi Konsep Pemilu; Fungsi, Sistem Pemilu; Sistem pemilu legislatif; Sistem Pemilu Presiden/Wapres.
- Modul 10 : Warga Negara
Bahasan utama Modul X ini adalah Warga Negara dan kewarganegaraan dengan subpokok bahasan Konsep Dasar Kewarganegaraan; dan Prinsip-prinsip kewarganegaraan;
- Modul 11 : Hak Konstitusional Warga Negara
Pokok bahasan pada modul ini adalah Hak Konstitusional Warga Negara. Terdapat dua subpokok bahasan, yaitu Konsep Dasar Hak Asasi Manusia; dan Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara;
- Modul 12 : Konsep-konsep ketatanegaraan Kontemporer
Di dalam Modul XII anda akan diajak untuk mempelajari Konsep-Konsep ketatanegaraan sebagai bahasan utama dengan dua sub pokok bahasan Konsep *Green Constitution* dan *Blue Constitution*; Diaspora dan Multi kewarganegaraan

Mata kuliah Hukum Tata Negara Lanjut adalah mata kuliah yang mempelajari Hukum Tata Negara positif dalam pengertian hukum tata negara yang berlaku dan dilaksanakan pada saat sekarang. Sumber Utamanya adalah UUD NRI 1945, Namun demikian di dalam pembahasan di setiap pokok bahasan, menyentuh juga aspek teoretis kenegaraan dan sejarah hukum tata negara. Pembahasan mengenai teori tata negara dan sejarah tata negara dilakukan di awal setiap kegiatan belajar.

Untuk dapat memahami isi BMP ini, Saudara harus mempelajari modul secara sistematis dimulai dari modul 1 sampai dengan modul 12. Kerjakan latihan dan Test Formatif yang ada di setiap akhir kegiatan belajar. Pelajari juga setiap kata-kata penting dalam modul seperti yang ditampilkan dalam glosarium. Untuk mendapatkan pemahaman lebih, Saudara sangat dianjurkan untuk membaca referensi-referensi lain yang relevan di luar BMP utamanya buku-buku referensi yang ada di dalam daftar pustaka sepanjang dapat diakses.

A. RELEVANSI

Keterkaitan mata kuliah Hukum Tata negara Lanjut adalah Keempat mata kuliah wajib BKU HTN sesungguhnya adalah satu kesatuan. Hukum Tata Negara Lanjut pada dasarnya adalah mata kuliah yang materinya adalah keseluruhan aspek hukum tata negara. Oleh karena itu, irisan dengan mata kuliah lainnya adalah sebuah keniscayaan.

Adapun Kaitan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Materi-materi pembahasan dalam mata kuliah hukum tata negara Indonesia merupakan aspek-aspek yang diperbandingkan dalam mata kuliah Teori dan Metode Perbandingan Hukum Konstitusi
2. Di dalam Mata kuliah hukum tata negara lanjut membahas persoalan kelembagaan yang dalam hal ini termasuk juga lembaga yang berwenang membentuk undang-undang sedangkan mata kuliah Teori dan Teknik Perancangan Undang-Undang lebih berfokus kepada prosedur dan praktik pembentukan undang-undang;
3. Menurut Fritz Werner, hukum administrasi negara adalah hukum tata negara yang berada dalam keadaan konkret. Dengan demikian dapat kita gambarkan kaitan antara mata kuliah Hukum Tata Negara Lanjut dengan Mata kuliah Hukum administrasi dan Pemerintahan daerah terletak pada kesamaan objek kajiannya. Perbedaanannya terletak pada aspek pembahasannya.

B. MANFAAT

Mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia ini adalah mata kuliah yang objeknya adalah hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Materi pembelajarannya lebih bersifat praktis meliputi pengaturan lembaga negara, pemilihan umum, partai politik, dan kewarganegaraan, sehingga setelah mengikuti perkuliahan dan membaca modul ini peserta diharapkan akan mampu memahami dan menganalisis norma serta praktik ketatanegaraan.

Peta Kompetensi
Hukum Tata Negara Indonesia/MKUM5211/4 SKS

